

Strategi *Environmental Governance* melalui Zonasi Kawasan dan Edukasi Pengelolaan Sampah di Pantai Arjuna Desa Tolai Barat

I Gede Adiyana Putra¹, I Nyoman Slamet², Ni Wayan Sri Rahayu³, Komang Triawati⁴,
I Komang Kartia⁵

^{1,2,3,4,5} Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Dharma Sentana, Program Studi Pariwisata Budaya dan Keagamaan.

E-mail: niwayansrirahayu@gmail.com

*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.3453>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 15 Juli 2026

Revised: 20 Juli 2026

Accepted: 28 Juli 2026

Kata Kunci:

Environmental Governance, Zonasi Kawasan, Pengelolaan Sampah, Partisipasi Masyarakat, Wisata Pantai.

Keywords:

Environmental Governance, Coastal Zoning, Waste Management, Community Participation, Coastal Tourism



ABSTRACT

Penelitian pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi *environmental governance* melalui zonasi kawasan dan edukasi pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Pantai Arjuna. Permasalahan utama yang dihadapi kawasan wisata pantai meliputi belum optimalnya penataan kawasan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, serta meningkatnya volume sampah akibat aktivitas wisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan masyarakat, pengelola wisata, dan pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan dan zonasi kawasan mampu menciptakan pengelolaan ruang yang lebih tertata melalui pembagian area wisata, konservasi, parkir, dan pengelolaan sampah. Selain itu, edukasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat berhasil meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, gotong royong, dan pembentukan kelompok pengelola lingkungan. Implementasi strategi *environmental governance* berbasis partisipasi masyarakat memberikan dampak positif terhadap kebersihan kawasan pantai, kenyamanan pengunjung, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan wisata pesisir. Dengan demikian, pendekatan partisipatif menjadi strategi penting dalam mendukung pengelolaan kawasan wisata pantai yang berkelanjutan.

This community service research aims to analyze the implementation of environmental governance strategies through coastal zoning and community-based waste management education at Pantai Arjuna. The main problems faced by the coastal tourism area include inadequate spatial management, low public awareness of environmental cleanliness, and increasing waste volume caused by tourism activities. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving local communities, tourism managers, and village authorities. The results showed that coastal mapping and zoning created a more organized spatial management system through the division of tourism, conservation, parking, and waste management areas. In addition, community-based waste management education successfully improved public environmental awareness through socialization programs, collective clean-up activities, and the establishment of environmental management groups. The implementation of participatory environmental governance strategies had a positive impact on coastal cleanliness, visitor comfort, and strengthening community capacity in maintaining the sustainability of coastal tourism environments. Therefore, a participatory approach is considered an important strategy in supporting sustainable coastal tourism management.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: I Gede Adiyana Putra et al (2026). Strategi *Environmental Governance* melalui Zonasi Kawasan dan Edukasi Pengelolaan Sampah di Pantai Arjuna Desa Tolai Barat 5(1) <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.3453>

PENDAHULUAN

Kawasan pesisir menjadi wilayah strategis yang memiliki fungsi ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi bagi kehidupan masyarakat disekitarnya. Dalam hal ini bahwa pantai tidak hanya berperan sebagai ruang interaksi antara ekosistem darat dan laut, tetapi juga menjadi sumber penghidupan masyarakat melalui sektor perikanan, pariwisata, perdagangan, dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kawasan pesisir harus dikelola secara optimal agar pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sistem tata kelola lingkungan (*environmental governance*) yang mampu menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem pesisir (Arifin, 2021). Konsep *environmental governance* berkembang sebagai pendekatan pengelolaan lingkungan yang menekankan pada keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya lingkungan. Tata kelola lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat, kelompok lokal, akademisi, dan sektor swasta dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Menurut United Nations Environment Programme, tata kelola lingkungan yang baik harus dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan (Mazzarino, dkk, 2020).. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek utama dalam menjaga dan mengelola lingkungan di wilayahnya masing-masing.

Salah satu persoalan lingkungan yang banyak terjadi di kawasan wisata pantai adalah meningkatnya volume sampah akibat aktivitas wisata dan kurang optimalnya sistem pengelolaan kawasan. Permasalahan sampah menjadi isu serius karena berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan pesisir. Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari laut, merusak ekosistem pantai, mengganggu kesehatan masyarakat, serta menurunkan estetika dan daya tarik wisata suatu kawasan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah plastik menjadi salah satu jenis sampah yang paling mendominasi pencemaran lingkungan pesisir di Indonesia (Pratama & Oktavia, 2024). Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah serta minimnya fasilitas pendukung pengelolaan lingkungan di kawasan wisata.

Permasalahan sampah di kawasan pantai juga diperparah oleh meningkatnya aktivitas wisata tanpa disertai sistem pengelolaan kawasan yang baik. Banyak kawasan wisata pantai yang berkembang secara alami tanpa perencanaan tata ruang dan zonasi yang jelas. Akibatnya, aktivitas wisata, area parkir, tempat kuliner, dan pembuangan sampah bercampur dalam satu kawasan tanpa pengaturan yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan lingkungan menjadi tidak tertata, menimbulkan penumpukan sampah, serta meningkatkan risiko kerusakan ekosistem pesisir. Oleh karena itu, penguatan sistem pengelolaan kawasan menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan kawasan wisata pantai. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam penguatan *environmental governance* adalah melalui sistem zonasi kawasan. Zonasi merupakan proses pembagian wilayah berdasarkan fungsi dan karakteristik tertentu agar pemanfaatan ruang menjadi lebih terarah dan terkendali (Koddeng, 2011). Dalam kawasan wisata pantai, zonasi dapat dibagi menjadi beberapa area seperti zona wisata, zona konservasi, zona parkir, zona kuliner, zona bermain, dan zona pengelolaan sampah. Pembagian kawasan tersebut bertujuan untuk menciptakan keteraturan lingkungan, meningkatkan kenyamanan pengunjung, serta mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap ekosistem pantai.

Selain menciptakan keteraturan kawasan, zonasi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Kawasan konservasi misalnya, dapat difungsikan untuk menjaga vegetasi pantai dan habitat biota laut agar tidak mengalami kerusakan akibat aktivitas wisata. Sementara itu, zona pengelolaan sampah dapat membantu proses pemilahan dan pengumpulan sampah sehingga tidak mencemari area wisata utama (Koddeng, 2011). Dengan adanya pembagian fungsi kawasan yang jelas, pengelolaan pantai menjadi lebih efektif dan terarah. Dalam upaya menjaga kebersihan kawasan pantai, edukasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjadi strategi yang sangat penting. Edukasi dilakukan sebagai proses peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada pembersihan kawasan, tetapi juga mencakup perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Edukasi dapat

dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan pemilahan sampah, kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, hingga kegiatan gotong royong kebersihan pantai.

Pemberian edukasi kepada masyarakat memiliki dampak yang signifikan dalam membangun budaya peduli lingkungan. Masyarakat yang memahami pentingnya pengelolaan sampah akan lebih sadar untuk menjaga kebersihan kawasan wisata dan tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, edukasi juga dapat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sampah sebagai sumber ekonomi melalui kegiatan daur ulang atau pengolahan sampah berbasis kreatifitas masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi solusi lingkungan, tetapi juga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Kondisi tersebut relevan dengan situasi di Pantai Arjuna yang memiliki potensi besar sebagai kawasan wisata berbasis pesisir. Pantai Arjuna merupakan salah satu destinasi wisata lokal yang mulai berkembang dan menjadi tempat rekreasi masyarakat. Kawasan ini memiliki panorama alam yang menarik dan berpotensi dikembangkan sebagai kawasan wisata berbasis lingkungan. Namun demikian, dalam pengelolaannya masih ditemukan berbagai permasalahan lingkungan seperti kurangnya sistem zonasi kawasan, belum tersedianya sistem pengelolaan sampah yang memadai, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan pengunjung dalam menjaga kebersihan lingkungan pantai.

Permasalahan tersebut menyebabkan kawasan pantai rentan mengalami pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah di beberapa titik kawasan wisata. Sampah plastik, botol minuman, dan sisa makanan sering ditemukan di sekitar area pantai sehingga mengurangi keindahan kawasan wisata. Selain itu, belum adanya pembagian kawasan yang jelas menyebabkan aktivitas pengunjung kurang tertata dan berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan pesisir. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, maka dapat berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan dan daya tarik wisata Pantai Arjuna di masa mendatang. Melihat kondisi tersebut, diperlukan strategi penguatan *environmental governance* yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan kawasan pantai. Pendekatan partisipatif menjadi penting karena keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah atau pengelola wisata semata, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan masyarakat lokal. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan wisata memiliki peran penting sebagai penjaga lingkungan sekaligus penggerak utama dalam menciptakan budaya sadar lingkungan.

Melalui program pengabdian kepada masyarakat, strategi *environmental governance* dapat diwujudkan melalui beberapa kegiatan seperti pemetaan dan zonasi kawasan pantai, edukasi pengelolaan sampah, penyediaan sarana kebersihan, serta pembentukan kelompok pengelola lingkungan. Kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola kawasan wisata secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan kelembagaan masyarakat juga penting untuk memastikan keberlanjutan program setelah kegiatan pengabdian selesai dilaksanakan. Program pengabdian ini juga menjadi bagian dari implementasi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menekankan keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pengelolaan kawasan pantai yang baik akan memberikan manfaat tidak hanya bagi kelestarian lingkungan, tetapi juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor wisata berbasis lingkungan. Kawasan pantai yang bersih, tertata, dan nyaman akan meningkatkan minat pengunjung sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Penguatan *environmental governance* melalui zonasi kawasan dan edukasi pengelolaan sampah di Pantai Arjuna menjadi langkah strategis dalam menciptakan kawasan wisata pesisir yang berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan, menciptakan sistem pengelolaan kawasan yang lebih tertata, serta membangun partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kawasan wisata pantai. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menjadi model pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat yang dapat diterapkan pada kawasan wisata pesisir lainnya di Sulawesi Tengah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan lingkungan secara mendalam terkait strategi *environmental governance* melalui zonasi kawasan dan edukasi pengelolaan sampah di Pantai Arjuna. Metode ini digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan, partisipasi masyarakat, serta proses pengelolaan kawasan wisata pantai secara alami

berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pantai Arjuna Desa Tolai Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* karena kawasan tersebut merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang memiliki potensi pengembangan wisata berbasis lingkungan, namun masih menghadapi berbagai permasalahan terkait pengelolaan kawasan dan sampah lingkungan.

Subjek penelitian terdiri atas pemerintah desa, pengelola kawasan wisata, masyarakat sekitar pantai, pelaku usaha lokal, serta pengunjung kawasan wisata. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pengelolaan lingkungan kawasan pantai. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam aktivitas pengelolaan kawasan, kebersihan lingkungan, dan kegiatan wisata masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi kawasan pantai, sistem pengelolaan sampah, aktivitas masyarakat, serta kondisi zonasi kawasan wisata. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan lingkungan, bentuk partisipasi masyarakat, strategi pengelolaan kawasan, serta upaya edukasi pengelolaan sampah yang dilakukan di kawasan pantai. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mendukung data penelitian berupa foto kegiatan, kondisi kawasan, data administratif desa, serta dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan lapangan terkait strategi *environmental governance* melalui zonasi kawasan dan edukasi pengelolaan sampah di kawasan wisata pantai. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh lebih valid dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Melalui metode penelitian kualitatif ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran secara komprehensif mengenai kondisi pengelolaan lingkungan di kawasan wisata pantai serta menghasilkan rekomendasi strategi penguatan *environmental governance* berbasis partisipasi masyarakat yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan dan Zonasi Kawasan Pantai

Pemetaan dan zonasi kawasan pantai menjadi salah satu strategi penting dalam penguatan *environmental governance* untuk menciptakan tata kelola lingkungan yang terarah, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi masyarakat. Dalam konteks kawasan wisata pesisir, pemetaan dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan, potensi kawasan, serta berbagai permasalahan yang muncul akibat aktivitas masyarakat dan wisatawan. Sementara itu, zonasi kawasan bertujuan untuk membagi wilayah pantai berdasarkan fungsi tertentu agar pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara tertib dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan (Putri & Setiawan, 2024). Pada kawasan wisata Pantai Arjuna, kegiatan pemetaan dan zonasi menjadi langkah awal yang penting dalam menciptakan sistem pengelolaan kawasan yang lebih terorganisir dan ramah lingkungan. Berdasarkan hasil observasi lapangan, kondisi kawasan pantai masih menunjukkan adanya pemanfaatan ruang yang belum tertata secara optimal. Aktivitas wisata, area parkir, tempat berjualan, lokasi bermain pengunjung, dan titik pembuangan sampah masih bercampur dalam satu area tanpa adanya pembagian ruang yang jelas. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa titik kawasan menjadi padat, kurang nyaman, dan rentan mengalami penumpukan sampah. Selain itu, belum adanya penentuan zona konservasi juga menyebabkan beberapa area pesisir berpotensi mengalami kerusakan akibat aktivitas pengunjung yang tidak terkendali. Situasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan wisata pantai memerlukan sistem penataan ruang yang lebih terarah melalui pendekatan zonasi kawasan. Dalam proses pemetaan kawasan, tim pengabdian melakukan identifikasi terhadap berbagai potensi dan permasalahan lingkungan di kawasan pantai. Potensi yang ditemukan meliputi keindahan panorama pantai, area rekreasi masyarakat, potensi pengembangan wisata kuliner, serta peluang pengembangan wisata berbasis lingkungan. Namun demikian, terdapat pula berbagai permasalahan seperti kurangnya fasilitas

kebersihan, belum tersedianya tempat sampah yang memadai, rendahnya kesadaran pengunjung terhadap kebersihan lingkungan, serta belum adanya sistem pengelolaan kawasan yang terintegrasi. Temuan tersebut menjadi dasar dalam menyusun pembagian zonasi kawasan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan pantai.

Zonasi kawasan pantai dilakukan dengan membagi wilayah ke dalam beberapa fungsi utama, yaitu zona wisata, zona kuliner, zona parkir, zona konservasi, zona untuk para nelayan dan zona pengelolaan sampah. Zona wisata difokuskan sebagai area utama aktivitas pengunjung, seperti tempat rekreasi dan kegiatan masyarakat di sekitar pantai. Zona kuliner diperuntukkan bagi pedagang agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih tertata dan tidak mengganggu area utama wisata. Sementara itu, zona parkir ditetapkan untuk mengurangi kepadatan kendaraan di sekitar bibir pantai sehingga kawasan terlihat lebih rapi dan nyaman. Serta untuk zona para nelayan adalah di khususkan bagi para nelayan untuk melakukan aktivitasnya dalam menangkap ikan termasuk untuk area penyimpanan perahu yang mereka gunakan dalam menangkap ikan. Pembagian kawasan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan dan menciptakan kenyamanan bagi pengunjung. Selain zona wisata dan zona ekonomi masyarakat, penetapan zona konservasi juga menjadi bagian penting dalam strategi pengelolaan kawasan pantai.



Gambar.1 Penanaman Pohon di Area Zona Konservasi di Pantai Arjuna

Zona konservasi bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Kawasan ini difokuskan sebagai area perlindungan vegetasi pantai dan ruang terbuka yang tidak digunakan secara intensif untuk aktivitas wisata. Disamping itu kegiatan pada zona konservasi juga dilakukan dengan penanaman pohon dan bersih-bersih lingkungan. Keberadaan zona konservasi sangat penting karena kawasan pesisir memiliki fungsi ekologis sebagai pelindung alami pantai dari abrasi serta habitat bagi berbagai biota laut dan pesisir. Dengan adanya zona konservasi, keseimbangan antara aktivitas wisata dan pelestarian lingkungan dapat lebih terjaga. Dalam implementasinya, proses zonasi kawasan juga melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat dilakukan melalui diskusi, observasi bersama, dan penentuan titik kawasan yang dianggap strategis untuk pengembangan wisata maupun pengelolaan lingkungan. Pendekatan partisipatif tersebut penting karena masyarakat lokal merupakan pihak yang paling memahami kondisi kawasan pantai dan memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan lingkungan. Melalui keterlibatan masyarakat, proses penataan kawasan menjadi lebih mudah diterima dan memiliki peluang keberlanjutan yang lebih tinggi.

Partisipasi masyarakat dalam pemetaan kawasan juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan berbasis tata ruang. Masyarakat mulai memahami bahwa kawasan wisata yang tertata dengan baik akan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan pengunjung dan peningkatan daya tarik wisata. Selain itu, zonasi kawasan juga membantu masyarakat dalam mengatur aktivitas ekonomi agar tidak merusak lingkungan pantai. Kondisi ini sejalan dengan penelitian mengenai pengelolaan kawasan wisata pantai yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pengelolaan lingkungan pesisir secara berkelanjutan. Pemetaan kawasan juga memberikan gambaran mengenai titik-titik yang berpotensi menjadi sumber pencemaran lingkungan, terutama akibat penumpukan sampah. Beberapa area yang dekat dengan pusat aktivitas pengunjung cenderung menjadi lokasi dengan volume sampah paling tinggi, khususnya sampah plastik dan sisa makanan. Oleh karena itu, dalam proses zonasi ditentukan pula lokasi khusus pengelolaan sampah yang dilengkapi dengan tempat penampungan sementara. Penentuan titik pengelolaan sampah tersebut bertujuan untuk memudahkan proses pengumpulan dan pengangkutan sampah sehingga tidak mencemari kawasan wisata utama.

Strategi zonasi kawasan yang dipadukan dengan sistem pengelolaan sampah menjadi bentuk implementasi *environmental governance* berbasis masyarakat. Tata kelola lingkungan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik kawasan, tetapi juga pada penguatan kesadaran sosial masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dengan adanya pembagian fungsi kawasan yang jelas, masyarakat dan pengunjung dapat memahami area yang boleh digunakan untuk aktivitas tertentu serta area yang harus dijaga kelestariannya. Pendekatan ini dinilai efektif dalam mengurangi risiko kerusakan lingkungan akibat aktivitas wisata yang tidak terkendali. Selain memberikan dampak terhadap pengelolaan lingkungan, pemetaan dan zonasi kawasan juga memiliki pengaruh terhadap pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Kawasan wisata yang tertata akan memberikan kenyamanan bagi pengunjung sehingga dapat meningkatkan minat wisatawan untuk datang ke pantai. Peningkatan jumlah pengunjung secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pedagang dan pelaku usaha kecil di sekitar kawasan pantai. Dengan demikian, pengelolaan kawasan berbasis zonasi tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan. Pemetaan dan zonasi kawasan pantai di Pantai Arjuna menjadi langkah strategis dalam menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih baik. Kegiatan ini mampu memberikan arah pengelolaan kawasan yang lebih terstruktur, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta mendukung pengembangan wisata pantai berbasis keberlanjutan. Melalui penguatan *environmental governance*, kawasan pantai diharapkan dapat berkembang menjadi destinasi wisata yang bersih, tertata, dan tetap menjaga keseimbangan ekosistem pesisir untuk generasi mendatang.

Edukasi dan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Edukasi dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan bagian penting dalam penguatan *environmental governance* di kawasan wisata pesisir. Permasalahan sampah di kawasan pantai tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya aktivitas wisata, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan pengunjung terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan edukatif menjadi salah satu strategi utama dalam membangun perilaku masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan kawasan wisata di Pantai Arjuna, edukasi pengelolaan sampah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak sampah terhadap lingkungan pesisir dan pentingnya keterlibatan bersama dalam menjaga kebersihan kawasan wisata. Berdasarkan hasil observasi lapangan, salah satu permasalahan utama yang ditemukan di kawasan Pantai Arjuna adalah masih adanya kebiasaan membuang sampah sembarangan, baik oleh pengunjung maupun sebagian masyarakat sekitar kawasan pantai. Sampah plastik, botol minuman, kantong makanan, dan sisa aktivitas wisata banyak ditemukan di area pesisir, terutama pada titik-titik yang menjadi pusat keramaian pengunjung. Kondisi tersebut tidak hanya mengurangi estetika kawasan wisata, tetapi juga berpotensi mencemari ekosistem pesisir dan laut. Sampah plastik yang terbawa air laut dapat merusak habitat biota laut dan mengganggu keseimbangan lingkungan pesisir. Permasalahan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak cukup hanya melalui penyediaan fasilitas kebersihan, tetapi juga memerlukan perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat melalui proses edukasi yang berkelanjutan.

Kegiatan edukasi pengelolaan sampah dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta pengunjung kawasan pantai. Materi edukasi yang diberikan meliputi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dampak sampah terhadap ekosistem pesisir, pemilahan sampah organik dan anorganik, serta pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Edukasi dilakukan dengan pendekatan partisipatif agar masyarakat dapat memahami secara langsung pentingnya pengelolaan lingkungan berbasis kesadaran kolektif. Selain itu, kegiatan edukasi juga dikaitkan dengan nilai sosial dan budaya masyarakat setempat, seperti semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan. Dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat diberikan pemahaman bahwa kawasan pantai merupakan aset bersama yang harus dijaga demi keberlanjutan lingkungan dan ekonomi masyarakat. Pantai yang bersih dan tertata akan memberikan kenyamanan bagi pengunjung serta meningkatkan daya tarik wisata kawasan. Sebaliknya, kawasan wisata yang dipenuhi sampah akan menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung dan berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, masyarakat mulai didorong untuk melihat pengelolaan sampah bukan hanya sebagai tanggung jawab individu, tetapi sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan sumber ekonomi masyarakat desa.



Gambar 2. Kegiatan Bersih-Bersih dan Penyerahan Peralatan Bersih-Bersih

Selain kegiatan sosialisasi, edukasi juga dilakukan melalui praktik langsung pengelolaan sampah di kawasan pantai. Kegiatan tersebut meliputi aksi bersih pantai, pemilahan sampah, dan penempatan tempat sampah pada beberapa titik strategis kawasan wisata. Kegiatan gotong royong membersihkan pantai menjadi media edukasi yang efektif karena masyarakat dapat terlibat langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga membangun kesadaran melalui pengalaman langsung di lapangan. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap kebersihan kawasan pantai.

Sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat juga dilakukan dengan membangun pola pengelolaan yang sederhana namun berkelanjutan. Sampah yang dihasilkan di kawasan wisata mulai dipilah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik seperti sisa makanan diarahkan untuk dibuang pada tempat khusus, sedangkan sampah anorganik seperti botol plastik dan kemasan minuman dikumpulkan untuk didaur ulang atau dijual kembali. Sistem pemilahan sampah tersebut bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang mencemari kawasan pantai sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Keberhasilan sistem pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat lokal. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengabdian masyarakat dibentuk kelompok pengelola lingkungan yang bertugas mengawasi kebersihan kawasan pantai dan mengoordinasikan kegiatan pengelolaan sampah. Kelompok tersebut terdiri dari masyarakat setempat, pemuda desa, dan pelaku usaha di kawasan wisata. Pembentukan kelompok pengelola menjadi bagian penting dalam implementasi *environmental governance* karena menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang berbasis komunitas dan berkelanjutan. Dengan adanya kelompok pengelola, kegiatan kebersihan pantai tidak hanya dilakukan pada saat program pengabdian berlangsung, tetapi dapat terus dijalankan secara mandiri oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah juga menunjukkan adanya perubahan perilaku sosial yang positif. Masyarakat mulai memahami pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan kawasan wisata sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Beberapa pedagang di kawasan pantai juga mulai menyediakan tempat sampah di sekitar area usaha mereka serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Perubahan tersebut menjadi indikator bahwa edukasi lingkungan yang dilakukan mulai memberikan dampak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan pantai. Selain memberikan dampak terhadap kebersihan lingkungan, sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat juga memiliki nilai sosial dan ekonomi. Sampah anorganik yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan kembali melalui kegiatan daur ulang atau dijual kepada pengepul sehingga memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya dipandang sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga sebagai peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Kondisi ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam proses pembangunan masyarakat.



Gambar 3. Pembuatan Bak Sampah

Penerapan edukasi dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Pantai Arjuna juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat dipengaruhi oleh kesadaran kolektif masyarakat. Tata kelola lingkungan yang baik tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku utama dalam menjaga lingkungan. Pendekatan partisipatif yang dilakukan melalui edukasi, gotong royong, dan pembentukan kelompok pengelola terbukti mampu meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap kawasan wisata pantai.

Secara keseluruhan, edukasi dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjadi strategi penting dalam penguatan *environmental governance* di Pantai Arjuna. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kawasan wisata yang bersih dan nyaman, tetapi juga membangun kesadaran ekologis masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan pesisir. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, pengelolaan sampah dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga mampu menjaga kelestarian lingkungan pantai sekaligus mendukung pengembangan wisata berbasis lingkungan di kawasan tersebut.

Implementasi Strategi Environmental Governance Berbasis Partisipasi Masyarakat

Implementasi strategi *environmental governance* berbasis partisipasi masyarakat merupakan salah satu pendekatan penting dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di kawasan wisata pesisir. Konsep *environmental governance* tidak hanya menekankan pada kebijakan dan pengaturan lingkungan oleh pemerintah, tetapi juga menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks kawasan wisata pantai, keterlibatan masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan program pengelolaan lingkungan karena masyarakat merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan kawasan wisata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, implementasi strategi *environmental governance* di Pantai Arjuna dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan pantai.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, sebelum pelaksanaan program pengabdian masyarakat, pengelolaan kawasan wisata Pantai Arjuna masih dilakukan secara sederhana dan belum memiliki sistem tata kelola lingkungan yang terstruktur. Aktivitas masyarakat dan pengunjung di kawasan pantai berlangsung tanpa adanya aturan kawasan yang jelas, sehingga menyebabkan berbagai persoalan lingkungan seperti penumpukan sampah, penggunaan ruang yang tidak tertata, dan rendahnya kesadaran menjaga kebersihan pantai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan wisata tidak dapat berjalan secara optimal apabila hanya bergantung pada pemerintah desa atau pengelola tertentu tanpa keterlibatan masyarakat secara luas.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, implementasi strategi *environmental governance* dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam proses pengelolaan lingkungan kawasan pantai. Masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pengelolaan kawasan. Keterlibatan masyarakat dimulai melalui kegiatan diskusi dan musyawarah bersama yang membahas kondisi lingkungan pantai, permasalahan yang dihadapi, serta strategi pengelolaan kawasan yang dapat diterapkan secara bersama-sama. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan wisata.

Kegiatan partisipatif tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuhnya rasa memiliki (*sense of belonging*) masyarakat terhadap kawasan wisata Pantai Arjuna. Masyarakat mulai memahami bahwa keberlanjutan kawasan pantai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Kesadaran tersebut menjadi modal sosial

yang penting dalam membangun sistem tata kelola lingkungan berbasis komunitas. Partisipasi masyarakat juga terlihat dalam kegiatan gotong royong membersihkan kawasan pantai, penataan area wisata, serta pengawasan terhadap perilaku pengunjung yang membuang sampah sembarangan.

Dalam implementasi strategi *environmental governance*, pembentukan kelompok pengelola lingkungan menjadi salah satu langkah utama yang dilakukan dalam program pengabdian masyarakat. Kelompok pengelola terdiri dari masyarakat lokal, pemuda desa, pelaku usaha kecil, dan tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan pantai. Kelompok ini memiliki peran dalam mengoordinasikan kegiatan kebersihan kawasan, mengawasi pengelolaan sampah, memberikan edukasi kepada pengunjung, serta menjaga ketertiban kawasan wisata. Pembentukan kelompok pengelola bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih terorganisir dan berkelanjutan.

Keberadaan kelompok pengelola lingkungan juga menjadi bentuk implementasi nyata dari prinsip *community-based environmental governance*, yaitu pengelolaan lingkungan yang berpusat pada masyarakat lokal. Melalui sistem ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari kawasan wisata, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Pendekatan berbasis masyarakat dinilai lebih efektif karena masyarakat memiliki pengetahuan lokal mengenai kondisi kawasan dan lebih memahami kebutuhan lingkungan di wilayah mereka sendiri. Selain itu, keterlibatan masyarakat secara langsung dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kawasan wisata pantai.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan juga diwujudkan melalui kegiatan edukasi dan kampanye kebersihan lingkungan. Masyarakat dan pengunjung diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan kawasan pantai serta dampak negatif sampah terhadap ekosistem pesisir. Edukasi dilakukan melalui sosialisasi, pemasangan papan imbauan, dan kegiatan aksi bersih pantai secara rutin. Pendekatan edukatif tersebut bertujuan untuk membangun budaya sadar lingkungan di kalangan masyarakat dan pengunjung kawasan wisata.

Selain kegiatan kebersihan, implementasi *environmental governance* juga diwujudkan melalui pengaturan zonasi kawasan pantai yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam proses zonasi, masyarakat dilibatkan dalam penentuan area wisata, area konservasi, area kuliner, dan titik pengelolaan sampah. Keterlibatan masyarakat dalam penataan kawasan memberikan dampak positif terhadap keteraturan lingkungan serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap fungsi masing-masing zona kawasan. Dengan adanya pembagian kawasan yang jelas, aktivitas wisata menjadi lebih tertata dan potensi kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Implementasi strategi *environmental governance* berbasis partisipasi masyarakat juga memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Masyarakat mulai memiliki pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sampah, penataan kawasan wisata, dan pelestarian ekosistem pantai. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat juga mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif bahwa lingkungan yang bersih dan tertata akan memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan kunjungan wisatawan. Dengan demikian, masyarakat mulai melihat pengelolaan lingkungan sebagai investasi jangka panjang bagi keberlanjutan kawasan wisata dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dari aspek sosial, implementasi strategi *environmental governance* juga memperkuat hubungan sosial masyarakat melalui kegiatan gotong royong dan kerja sama antarwarga. Nilai kebersamaan yang tumbuh dalam kegiatan pengelolaan lingkungan menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung keberlanjutan program. Kegiatan bersama seperti aksi bersih pantai dan pengelolaan kawasan wisata menciptakan rasa tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan pantai sebagai aset bersama masyarakat desa.

Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan fasilitas kebersihan, kurangnya dukungan sarana pengelolaan sampah, dan masih adanya sebagian masyarakat atau pengunjung yang belum memiliki kesadaran penuh terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan edukasi yang berkelanjutan agar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dapat terus meningkat. Dukungan pemerintah desa dan kerja sama dengan berbagai pihak juga diperlukan untuk memperkuat sistem tata kelola lingkungan di kawasan wisata pantai.

Secara keseluruhan, implementasi strategi *environmental governance* berbasis partisipasi masyarakat di Pantai Arjuna menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan faktor utama dalam menciptakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui partisipasi aktif masyarakat, pengelolaan kawasan wisata pantai dapat berjalan lebih efektif, terorganisir, dan memiliki keberlanjutan jangka panjang. Pendekatan ini tidak hanya memberikan dampak terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan pantai, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan kawasan wisata berbasis lingkungan.

SIMPULAN

Implementasi strategi *environmental governance* melalui zonasi kawasan dan edukasi pengelolaan sampah di Pantai Arjuna menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat mampu menjadi solusi dalam menciptakan kawasan wisata pantai yang lebih tertata, bersih, dan berkelanjutan. Kegiatan pemetaan dan zonasi kawasan memberikan arah pengelolaan ruang yang lebih jelas melalui pembagian fungsi kawasan seperti zona wisata, zona konservasi, zona kuliner, dan zona pengelolaan sampah. Penataan kawasan tersebut membantu mengurangi aktivitas yang tidak teratur serta mendukung pelestarian lingkungan pesisir.

Selain itu, edukasi dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengunjung terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pantai. Melalui kegiatan sosialisasi, gotong royong, dan praktik pengelolaan sampah, masyarakat mulai memahami pentingnya pemilahan sampah dan pengurangan pencemaran lingkungan. Pembentukan kelompok pengelola lingkungan juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat keberlanjutan program pengelolaan kawasan wisata berbasis komunitas.

Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi *environmental governance* di kawasan Pantai Arjuna. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan lingkungan mampu menciptakan rasa memiliki terhadap kawasan wisata sehingga pengelolaan lingkungan tidak hanya bergantung pada pemerintah desa, tetapi dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat lokal. Dengan demikian, strategi *environmental governance* berbasis partisipasi masyarakat tidak hanya memberikan dampak terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan pantai, tetapi juga mendukung pengembangan wisata berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tolai Barat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, STAH Dharma Sentana yang telah memberikan bantuan dana sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta ide dalam penyusunan artikel pengabdian ini. Tidak lupa pula kami sampaikan terimakasih kepada Tim Redaksi dan Pengelola Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Jerkin. Begitu pula masyarakat di Wilayah Tolai Barat yang turut melancarkan kegiatan pengabdian ini. Sekiranya artikel ini dapat memberikan manfaat baik dalam peningkatan jumlah publikasi maupun varian literasi.

REFERENSI

- Arifin, Z. (2021). *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mazzarino, J. M., Turatti, L., & Petter, S. T. (2020). Environmental governance: Media approach on the united nations programme for the environment. *Environmental Development*, 33, 100502.
- Pratama, E. B., & Oktavia, P. (2024). Tantangan Dalam Mengembangkan Komunikasi Lingkungan Pada Isu Sampah Plastik. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 303-314.
- Koddeng, B. (2011). Zonasi Kawasan Pesisir Pantai Makassar Berbasis Mitigasi Bencana. *Makassar: Universitas Hasanuddin*.
- Putri, K., & Setiawan, B. (2024). Analisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di kawasan wisata bahari Pantai Tanjung Pasir. *JURNAL PARIWISATA DAN PERHOTELAN Учредители: Indonesian Journal Publisher*, 2(1), 12.